

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN MANDIRI STKIP PGRI SUMENEP
SKEMA PENELITIAN PEMULA**



**Bidang Hukum
(Hukum dan Sumber Daya Alam)**

**DERADIKALISASI AGAMA DI KABUPATEN SUMENEP
(Kiprah Ormas NU dan Pemuda Muhammadiyah Dalam Melawan Radikalisme
Agama)**

TIM PENGUSUL

Drs. Hasan Basri, M.Si **0020126101 (Ketua pengusul)**
Suluh Mardika Alam, M.Hum **0704048404 (Anggota pengusul)**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STKIP PGRI SUMENEP
JUNI 2022**

**HALAMAN PENGESAHAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN SKEMA PENELITIAN
PEMULA**

Judul Penelitian : POLA PRAKTIK PENGGUNAAN POLITIK UANG
DALAM PILKADES DI KABUPATEN SUMENEP
(Studi fenomenologis transaksi politik dalam
proses demokrasi lokal)

Ketua Peneliti

a. Nama lengkap : **Drs. Hasan Basri, M.Si**
b. NIDN : 0020126101
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d. Program Studi : PPKn
e. Nomor HP : 081996625088
f. Alamat Surel (e-mail) : ikmal@stkipgrisumenep.ac.id

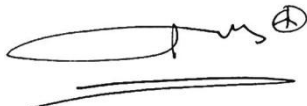
Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : **Suluh Mardika Alam, M.Hum**
b. NIDN : 0704048404
c. Program Studi : PPKn
Staf pendukung penelitian : 1 orang
Mahasiswa Terlibat : 3 orang (Nur Indiyani, Dwi Andika K, Etika Putri)

Sumenep, 30 Juni 2022

Kaprodi PPKn STKIP PGRI Sumenep

Ketua Peneliti



Suluh Mardika Alam, M.Hum

NIK. 07731139



Moh. Ikmal, M.Sos

NIDN. 0706068607



Menyetujui
Ketua STKIP PGRI Sumenep



Dr. Asmon, M.Pd

NIK.07731015

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

Judul penelitian :DERADIKALISASI AGAMA DI KABUPATEN SUMENEP (Kiprah Ormas NU dan Pemuda Muhammadiyah Dalam Melawan Radikalisme Agama)

Skema Penelitian : Pemula

1. Tim peneliti : 5 orang

| No | Nama | Jabatan | Bidang keahlian | Instansi asal | Alokasi waktu (jam/minggu) |
|----|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | Drs. Hasan Basri, M.Si | Ketua peneliti | Ilmu politik dan kebijakan public | STKIP PGRI Sumenep | 6 jam/minggu |
| 2 | Suluh Mardika Alam, M.Hum | Anggota Peneliti 1 | Sosial humaniora | STKIP PGRI Sumenep | 6 jam/minggu |
| 3 | Nur Indiyani | Anggota Peneliti 3 | Humas dan perijinan | STKIP PGRI Sumenep | 6 jam/minggu |
| 4 | Dwi Andika K | Staf Pendukung penelitian | Pengambilan data | STKIP PGRI Sumenep | 6 jam/minggu |
| 5 | Etika Putri | Administrator | Administrasi dan kearsipan | STKIP PGRI Sumenep | 6 jam/minggu |

2. Objek penelitian : produk kebijakan dan lokasi observasi lahan konversi
3. Masa pelaksanaan : 1 tahun (juni 2021 – juni 2022)
4. Usulan biaya : Rp. 7000.000
5. Lokasi penelitian : kabupaten Sumenep
6. Temuan yg ditargetkan : pola dan proses penggunaan praktek politik uang
7. Kontribusi bidang ilmu : penelitian ini diharapkan menjadi blueprint sekaligus master plan pendidikan politik demokrasi
8. Jurnal ilmiah sasaran : jurnal nasional bereputasi sinta 1-6
9. Rencana luaran : jurnal ilmiah published
10. Keterlibatan mahasiswa : terlampir diatas

RINGKASAN

Deradikalisasi adalah strategi utama pemerintah Indonesia dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Upaya ini disematkan dalam tugas pokok Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sepanjang tahun 2017, sudah ada 172 tersangka kasus terorisme. Jumlah tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dua tahun sebelumnya yakni 163 di tahun 2016 dan 73 di tahun 2015. Sumenep merupakan salah satu kabupaten ujung timur pulau Madura dimana mayoritas warganya beragama Islam yang pada 11 November 2021 kepolisian setempat berhasil melakukan penangkapan terduga pelaku teroris yang juga merupakan anggota Jamaah Islamiyah (JI) (harian kompas 11 November 2021. Aksi penangkapan pelaku yang di duga teroris tersebut tentu banyak menyita perhatian public termasuk kalangan Ormas keagamaan terbesar di kabupaten Sumenep yaitu NU dan Muhammadiyah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kiprah 2 Ormas keagamaan tersebut dalam mendorong upaya deradikalisasi agama di kabupaten sumenep. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dengan sumber data primer dan data skunder serta menggunakan prosedur pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil yang didapat dari penelitian adalah gerakan organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dengan dasar ideologis serta metode dakwahnya memiliki peranan signifikan dalam menanggulangi gerakan-gerakan radikalisme, sehingga masyarakat secara umum dapat terjaga dari gerakan-gerakan tersebut, sekaligus dengan kekuatan struktural dan kultural yang intensif mengawal kehidupan sosial.

Kata kunci : Deradikalisasi, Agama, Organisasi Kepemudaan

BAB I PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki landasan filosofis berpegang teguh pada keyakinan agama dengan Pancasila sebagai dasar negaranya yang berketuhanan yang maha esa sebagai nilai nomor satu sebagai Negara yang majemuk. termasuk agama yang berada di Indonesia juga memiliki keberagaman yang cukup bervariasi, saat ini terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh Undang-Undang. Dari 6 agama yang diakui secara resmi tersebut, Islam memiliki tingkatan tertinggi sebagai agama yang memiliki penganut mayoritas.

Perkembangan kehidupan dan pemikiran yang berada di Indonesia kemudian berdampak terhadap perkembangan pemikiran agama itu sendiri, perkembangan ini tentunya juga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pemikiran yang berada di kancah Internasional, yaitu ketika masuknya modernisasi, dunia islam juga mengalami perkembangan pemikiran yang cukup signifikan, yaitu pasca abad 15 setelah melesatnya sains di daratan Eropa kemudian menyebabkan dunia Islam sendiri harus mengikuti terhadap perkembangan sains tersebut.

Beberapa pemikir muslim khususnya mulai mengalami kegelisahan terhadap hal tersebut, kemudian merefleksikan ulang terhadap sejarah keemasan peradaban Islam sebelum bangkitnya Eropa, kemudian mereka banyak yang mulai merespon terhadap hal tersebut dengan membangun pemikiran- pemikiran agama dan sains yang lebih berkemajuan, sebab dalam perkembangan diluar Islam modernisasi tersebut menemukan banyak krisis sektoral seperti krisis ekologi. banyak para pemikir yang kemudian merefleksikan ulang terhadap krisis tersebut, salah satunya adalah Thomas

S. Khun, termasuk juga beberapa pemikir muslim Indonesia melaksanakan konferensi sains dan agama yang dilaksanakan di Yogyakarta, tentunya untuk menyikapi perkembangan modernisme dunia modern dengan diwarnai spirit skulerisasi dan pemikir ini mencoba untuk menemukan momentum baru penyesuaian sains yang sesuai dengan kebutuhan manusia tanpa eksploitasi dengan mencoba merefleksikan ulang kejadian sejarah perkembangan sains di dunia Islam yang dipegang oleh para filosof seperti Ibn Hayyan, Al-Biruni, Ibn Sina dan lain sebagainya (Bagir, 2006:49).

Ditengah perkembangan pemikiran dunia tersebut kemudian menimbulkan berbagai kegelisahan yang ada di tubuh agama islam itu sendiri. Ketika eropa semakin massif menyebarkan konsep pemikiran yang ditemukan dengan cara paksa melalui berbagai cara, mulai dari penjajahan dan penyebaran buku-buku yang diproduksi oleh mereka. Beberapa kalangan dalam Islam yang mengalami kegelisahan yang sangat keras kemudian merasa terancam dengan perkembangan barat tersebut, sehingga menjadikannya sebagai musuh, dan pada implikasinya gerakan radikal ini memiliki pegangan teguh pada permusuhannya terhadap barat (Rahman dalam Hasan, 2016: 74).

Kegelisahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa pemikir muslim ekstrim yang mempunyai pandangan bahwa skulerisasi merupakan suatu fenomena yang sangat membahayakan terhadap kemajuan agama Islam, dan Islam perlu melakukan perlawanan terhadap hal tersebut. Pemikir ini didominasi oleh pemikir yang fanatik terhadap suatu pendapat yang diyakini sebagai kebenaran mutlak dan menolak secara ekstrim terhadap yang berbeda atau yang biasa dikenal dengan anti toleran sebab secara prinsip mereka abai terhadap historisitas islam, tidak dialogis dan memiliki pemahaman harfiah terhadap teks agama tanpa mempertimbangkan tujuan esensial syariat (maqasid al-syari'at) (Naim, 2014: 100).

Radikalisme sebagai sebuah kajian literatur memiliki pengertian yang beragam. Naim (2014: 100) misalnya memberikan pengertian secara terminologis bahwa kelompok radikal adalah kelompok yang berada pada posisi ekstrim dan jauh dari posisi tengah-tengah atau melewati batas kewajaran. Hal demikian selain karena respon terhadap sekularisasi, juga disebabkan oleh pemahaman terhadap agama khususnya memahami konteks jihad dengan cara yang salah, yaitu yang secara prinsip agama sebagai nilai universal yang diserukan kepada manusia untuk membangun harmoni dalam kehidupan manusia secara menyeluruh, serta ajaran kebenaran sebagai instrumen untuk membuat kekerasan serta berujung pada terorisme yang membahayakan banyak pihak dalam kehidupan itu sendiri khususnya dalam memahami jihad (Mukhlishi, 2012: 175). Implikasi pemahaman demikian tentu membawa pengaruh besar dalam dinamika yang terjadi dalam kehidupan nyata. Pemahaman terhadap agama secara fanatik buta serta dengan menafikan perbedaan kemudian menimbulkan banyak konflik pada berbagai struktur yang ada. Mulai dari kalangan masyarakat biasa sampai pada kalangan antar elit agama itu sendiri, sehingga keberlanjutan perselisihan pemahaman yang menyebabkan konflik tersebut menimbulkan ketidak tentraman kehidupan sosial. Sebab radikalisme yang terjadi belakangan memiliki akibat terorisme. Di Indonesia sendiri periode kemunculan paham-paham keislaman yang radikal tersebut bermula sejak awal 1980-an yang dilatar belakangi oleh revivalisme Islam. Revivalisme ini berbentuk meningkatnya gairah kesantunan yang disebabkan oleh sosio kultur yang semakin mengalami kemajuan. Sebagai sebuah gerakan yang mempunyai gairah kebangkitan agama Islam secara kaffah tersebut dimotori oleh para mahasiswa diberbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang kemudian melahirkan suatu gerakan baru yang dikenal dengan istilah Tarbiyah (Kemudian Menjadi PKS). Mukhlishi (2018:53) mencatat beberapa data hasil kejadian-kejadian radikalisme yang berujung pada terorisme diberbagai wilayah yang ada di Indoensia.Kompas.com Pada tanggal 14 Mei 2018 merilis infOrmasi kejadian bom bunuh diri yang ada di Indonesia, yang pertama diledakkan di Bali pada tanggal 12 oktober 2012, kemudian setelahnya disusul dengan bom bunuh diri di salah satu hotel berbintang 5, JW Marriot di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Hingga yang terakhir bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo pada tanggal 13 Mei 2018. Bom bunuh diri yang terjadi tersebut diledakkan ditiga Gereja di Surabaya, dan di Rusun Wonocolo Sidoarjo. Selain data diatas, Komnas HAM mencatat ada 74 yang dilaporkan pada tahun 2014, meningkat menjadi 87 Kasus pada tahun 2015, dan Kompas.Com mencatat hampir 100 kasus yang terjadi.

Kabupaten Sumenep sebagai salah satu kabupaten paling ujung timur di pulau Madura, berdasarkan aspek sosiologis merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah pemeluk islam terbanyak yang keberadaan mereka tersebar ke dalam beberapa kelompok organisasi keagamaan yang ada. Diantaranya Ormas kegamaan yang ada di kabupaten Sumenep, Nahdlatul Ulama merupakan Ormas terbesar dan kemudian di susul dengan Muhammadiyah. Sebagai sebuah Ormas kegamaan yang ada, peran dan keberadaan mereka memiliki peran sentral dalam mendorong perubahan social masyarakat. Potensi demografis yang dimiliki Kabupaten Sumenep dan warga Madura pada umumnya sebagai kawasan religious turut menumbuhsuburkan pemahaman keagamaan dari paham-paham yang menyesatkan hingga paham-paham radikal. adalah merupakan salah satu daerah yang berada di Jawa Timur yang memiliki potensi

Radikalisme agama sebagaimana laporan pemberitaan Portal Madura.Com pada Senin (21/5/2018) menyebutkan bahwa Sumenep salah satu Kabupaten dari 8 Kabupaten yang ada di Jawa Timur yang memiliki potensi radikalisme agama. Hal tersebut merupakan hasil diskusi yang

dilakukan bersama Forum Komunikasi Penanggulangan Teroris (FKPT) Jawa Timur, Dr. Soubar Isman dan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, KH. Abdussomad Bukhori pada tahun 2016.

Tiga tahun setelah pemberitaan itu muncul ke permukaan, pada November 2021 kapolri dibantu kapolres setempat berhasil menangkap pelaku yang di duga sebagai teroris dan juga di duga merupakan jamaah anggota jamaah islamiyah (JI) (harian kompas, 21 November 2021). Melalui penjelasan diatas maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait bagaimana Peran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) NU dan Muhammadiyah dalam Menanggulangi Radikalisme Agama di Kabupaten Sumenep.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Dinamika Demokrasi dan Politik Desa

Secara teoritik, spirit demokrasi terangkum dalam nilai-nilai persamaan dan kebebasan. Prinsip tersebut tidak dapat dipisahkan dan menjadi ciri penting sebuah negara demokratis (Cholisin, 2007: 83). Oleh karenanya selama prinsip tersebut masih tetap dipertahankan maka sampai kapanpun demokrasi akan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

Sehingga pantaslah jika Maswardi Rauf (1998:23) mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah proses evolusi politik menuju titik yang tidak pernah selesai. Oleh karenanya sampai kapanpun demokrasi akan terus berevolusi hingga pada akhirnya dapat jatuh dan kemudian bangkit lagi. Dinamika perkembangan demokrasi di Indonesia misalnya juga menunjukkan bahwa perkembangan yang cukup signifikan dari zaman orde lama dengan demokrasi terpimpin hingga era reformasi yang justru semakin liberal.

Demokrasi adalah cara atau seni “pergaulan hidup” untuk mencapai kebaikan bersama (Sutoro Eko, 2010 : 1). Banyak orang memahami bahwa prinsip dasar demokrasi adalah kebebasan individu. Padahal elemen penting dari penerapan demokrasi adalah mendengarkan dan menghargai orang lain. Jika demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan rakyat, maka pemerintah harus banyak mendengarkan suara rakyat dalam mengambil keputusan dan bertindak.

Sebagai seni pergaulan hidup demokrasi bisa diwujudkan dalam level prosedural dan kultural. Demokrasi prosedural antara lain terkait dengan mekanisme pembuatan keputusan, penentuan pemimpin, dan artikulasi kepentingan masyarakat. Demokrasi pada level kultural terkait dengan budaya atau tatakrma (*fatsoen*) pergaulan hidup sehari-hari dalam arena masyarakat sipil. Ini tercermin dalam kultur yang toleran, terbuka, egalitarian, bertanggungjawab, *mutual trust*, kepedulian warga, kompetensi politik, dan seterusnya.

Ditengah praktek demokrasi yang tidak sehat dewasa ini dimana aspek keadilan dan kesejahteraan masih menjadi hal yang masih belum tercapai, keberadaan desa sebagai miniatur pemerintahan dan merupakan media interaksi politik yang relatif simpel dan sangat potensial untuk dijadikan cerminan kehidupan demokrasi dalam suatu masyarakat negara, seharusnya menjadi media pendidikan politik yang sehat. Akan tetapi fenomena merebaknya politik uang (*money politic*) seharusnya tidak kita temukan.

Sebagai miniatur pemerintahan pada level kecil tersebut, prinsip-prinsip praktek politik demokratis pada dasarnya dapat dimulai dari kehidupan politik di desa. Unsur-unsur esensial demokrasi dapat diterjemahkan dalam pranata kehidupan politik di level pemerintahan formal paling kecil tersebut. Menurut Robert Dahl, terdapat tiga prinsip utama pelaksanaan demokrasi, yakni (1) kompetisi, (2) partisipasi, dan (3) kebebasan politik dan sipil. Prinsip pertama bermakna bahwa harus terjadi kompetisi yang sehat dan luas di antara individu serta dalam kelompok-kelompok organisasi untuk mencapai kekuasaan pemerintahan, secara periodik dan persuasif (Sorensen, 2003: 19). Prinsip partisipasi meniscayakan adanya kesempatan yang terbuka dan merata bagi keterlibatan setiap anggota masyarakat atau negara. Keterlibatan sukarela warga negara atau masyarakat akan memberikan legitimasi politik bagi pemerintahan desa. Partisipasi

politik yang ideal didasarkan pada *political literacy* yang mendorong kepada keinginan untuk ikut serta mendorong dinamisasi proses politik. Partisipasi tersebut tidak dikoersi oleh paksaan yang *hard* (seperti tekanan fisik dan intimidasi) maupun paksaan yang *soft* (semisal mobilisasi dengan politik uang). Sementara kebebasan politik dan sipil adalah kebebasan yang mendukung iklim berkembangnya demokrasi yang sehat dimana jaminan pemenuhan hak-hak tersebut harus di bingkai dengan semangat HAM. Kebebasan sipil dan politik misalnya adalah kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan mendirikan dan menjadi anggota organisasi yang cukup untuk memastikan integritas partisipasi dan kompetisi politik (Cholisin, 2007:82).

Pintu gerbang demokratisasi di tingkat desa adalah pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan ajang sakral yang cukup menguras energi politik masyarakat desa, oleh karenanya pentingnya kedudukan kepala desa dalam mengelola pemerintahan desa jelas merupakan tonggak penting guna menciptakan sistem politik yang demokratis pada level bawah. Karena bagaimanapun desa menjadi media demokratisasi yang relatif sederhana dan menjadi cikal bakal berkembangnya budaya politik partisipan.

Kepala desa merupakan pemimpin formal tertinggi bagi masyarakat desa, bahkan Smith menyebut kepala desa adalah semacam raja kecil di daerahnya. Ia dengan demikian memegang tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemerintahan desa (M. Syahbuddin Latief, 2000: 1), dan bahkan tanggung jawab tersebut tidak semata pada aras politis akan tetapi juga aras teknis.

Gambaran empirik demikian memberikan penekanan betapa pentingnya posisi kepala dan harus segera ditambahkan betapa pentingnya prosesi pemilihan kepala desa. Maka, sesuatu yang wajar jika proses politik dalam pemilihan kepala desa ditempakan sebagai *centrum* demokrasi di desa.

B. Implementasi *Good Governance* di Desa

Governance adalah sebuah perspektif yang relevan untuk digunakan dalam membingkai pembaruan di desa. *Governance* merupakan paradigma baru dalam memperbaiki tata demokrasi di desa, menggantikan perspektif yang lama, yaitu *government*, yang secara konvensional memandang bahwa negara merupakan lembaga yang superior dan sentral, yang secara kedudukan berada di atas masyarakat dan dengan demikian dalam segi fungsi-fungsi dan kewenangan dianggap segala-galanya (IRE, 2001: 7).

Governance, atau secara lebih spesifik *good governance* atau tata pemerintahan yang baik, menempatkan pemerintah dan masyarakat dalam posisi yang *equal*, sehingga tidak ada dominasi dan hegemoni satu sama lain dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa. Sudut pandang baru tentang peran pemerintah dan masyarakat ini merupakan poin penting dalam mengembangkan dan mengimplementasikan tata pemerintahan yang baik di desa.

Goran Heyden (IRE, 2001: 8) mengidentifikasi tiga dimensi empirik *good governance*, yaitu: Pertama, partisipasi warga negara dalam proses politik. Aspek ini meliputi partisipasi politik, agregasi kepentingan, dan akuntabilitas publik dalam kebijakan. Kedua, kepemimpinan yang *responsible* dan responsif. Dimensi ini meniscayakan penghormatan terhadap peran dan status masyarakat/warga negara, transparansi dalam pembuatan kebijakan, dan menjunjung prinsip-prinsip *rule of law*. Ketiga, *social reciprocity* (resiprositas sosial masyarakat). Resiprositas sosial merupakan hubungan antar masyarakat yang melibatkan hubungan yang bersifat timbal balik dalam relasi sosial di antara berbagai komponennya. Aspek ini meniscayakan eksistensi hubungan yang bersifat kemitraan dalam berbagai unsur dalam masyarakat, antara lain pemerintah, masyarakat politik, *civil society*, dan komunitas bisnis.

Tiga dimensi empirik tata pemerintahan yang baik tersebut sangat mungkin direalisasikan pada pemerintahan desa dalam iklim pemerintahan yang tidak sentralistik, tidak terlalu bergantung dan berpusat pada lembaga pemerintahan di atasnya, mulai kecamatan hingga pusat. Dengan demikian, desentralisasi merupakan kunci utama dalam mendorong implementasi *good governance* di level desa.

Hal ini relevan dengan salah satu tatanan yuridis yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berusaha mendudukan desa (atau nama lain untuk satuan pemerintahan yang setingkat dengan desa) terpisah dari jenjang struktural pemerintahan, akan tetapi diakui sebagai suatu entitas pemerintahan di tingkat lokal dengan segala hak asal-usul dan adat istiadat yang dimiliki (Suharno, dalam *Jurnal Civics*, 2004: 175).

Dengan demikian, untuk menciptakan desa yang berdaulat secara hukum dan politis dan *legitimated* secara filosofis dan sosiologis, diperlukan upaya untuk “membersihkan” desa dan menata serta memperbaiki kembali pemerintahan di dalamnya sejalan dengan demokratisasi desentralistik yang sedang bergulir. Agenda pembaruan tata pemerintahan desa menjadi sesuatu yang tak terelakkan.

Ada beberapa hal yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki tata pemerintahan desa, antara lain; (1) mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. (2) Memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam mengelola kebijakan,

keuangan, pembangunan dan *public services*. (3) membuat parlemen desa bekerja lebih baik. (4) memperkuat partisipasi masyarakat desa. (5) membangun dan memperkuat masyarakat sipil (*civil society*) di tingkat desa. (6) Membangun kemitraan antara komponen pemerintahan desa dengan masyarakat. (7) membangkitkan kembali rembuk desa. (8) Mengatur pengelolaan keuangan desa secara lebih baik. (9) Membuat regulasi desa secara baik (IRE, 2001: 9-10).

Demokratisasi pada level desa meniscayakan upaya konsolidasi demokrasi yang tertata. Mochtar Mas'ood (1998) sebagaimana dikutip oleh Cholisin (2007:107) menyebutkan bahwa demokrasi akan terus bertahan dan berkembang dinamis selama memiliki lima prinsip penting yaitu :

1. Sistem politiknya memiliki legitimasi geografik, konstitusional dan politik;
2. Ada kesepakatan mengenai aturan main dan semua pihak mematuinya;
3. Pihak-pihak yang berhadapan bersepakat untuk menahan diri, sehingga pihak yang menang tidak menghancurkan yang kalah;
4. Kemiskinan di kalangan masyarakat terus diminimalkan;
5. Perpecahan etnik, kultural atau religiusnya tidak mendalam dan bisa di kompromikan;
6. Legitimasi geografik, diperoleh kalau rakyatnya mengakui kenyataan wilayah geografik yang ditetapkan negara itu dan menerima tempat tinggal mereka di dalam negara itu. Misalnya tidak adanya gerakan separatisme, sedangkan legitimasi konstitusional adalah adanya konstitusi yang bisa diterima oleh warga negara. Sedangkan legitimasi politik yaitu adanya dukungan dari suara mayoritas dalam pemilu.

C. Politik Uang dalam Proses Transisi Demokrasi

Dalam gelombang transisi demokrasi, John Markoff (2002: 206) mengindikasikan adanya fenomena *hybrid* dalam demokrasi. *Term* ini bermakna bahwa ada indikasi percampuran elemen-elemen demokratis dengan elemen-elemen non demokratis yang dapat ditemui dalam sebuah sistem politik.

Hal tersebut dapat dilihat dari proses hubungan antara mekanisme elektoral dengan kekuasaan politik. Subkultur demokrasi menyatakan bahwa rakyat diperintah melalui mandat yang diterimakan kepada pemerintah melalui pemilihan umum, dimana kehendak rakyat dapat diketahui kepada siapa mandat akan diberikan.

Gagasan bahwa setiap individu bebas memilih kandidatnya bagi suatu posisi kekuasaan dapat saja merupakan sebuah distorsi *mythic* dari realitas sebenarnya yang kompleks. Hal ini, oleh Markoff (2002: 207) dijelaskan dengan 3 (tiga) kemungkinan: (1) mungkin terdapat pembatasan-pembatasan (*constranits*) pada kapasitas individual untuk memilih, (2) mungkin terdapat

pembatasan atas luasnya pilihan-pilihan yang memungkinkan, (3) mungkin terdapat pembatasan-pembatasan pada derajat dimana pemilu menentukan siapa yang memegang kekuasaan.

Penjabaran tersebut sebenarnya membaca adanya kemungkinan-kemungkinan distorsi dalam demokrasi dengan berbagai sub-kulturnya. Adanya mekanisme elektoral demokrasi, dalam hal ini pemilihan umum, tidak juga memberikan jaminan bahwa kekuasaan yang dihasilkan akan bergerak ke arah penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Dalam bahasa yang lain Larry Diamond (2003: 16-17) memberikan sinyalemen yang tidak jauh berbeda. Ada fenomena yang dia sebut sebagai demokrasi semu (*pseudo-democracy*). Salah satu indikatornya adalah keberadaan mekanisme demokrasi tidak menjamin adanya demokrasi sebenarnya. Simbol-simbol demokrasi bahkan sangat mungkin men-tak kasat mata-kan atau bahkan meligitimasi penyelewengan-penyelewengan terhadap demokrasi.

Politik uang (*money politics*) merupakan salah satu fenomena dalam sistem politik yang dapat mendeligitimasi mekanisme elektoral di dalam demokrasi. Dalam demokrasi politik yang belum matang, seperti di Indonesia, politik uang dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan. Partisipasi politik masyarakat dengan demikian tidak didasarkan pada *political literacy* yang mereka miliki, akan tetapi dikungkung oleh keharusan memberikan preferensi atas kontestan yang memberikan uang dengan jumlah terbesar.

Dengan praktek uang seperti itu, politik akan bergeser dari mekanisme mewujudkan kepentingan bersama (*common good*) ke proyek bisnis. Hal tersebut juga menjadikan adanya lingkaran tiada putus antara politik korupsi dan korupsi politik (Cholisin, dalam Jurnal Civics, 2004: 159).

Bagi sang calon, mekanisme elektoral demikian tentu sangat mahal (*high cost mechanism*). Dan hal itu akan menyeret kekuasaan yang diraih ke dalam perilaku politik "balik modal". Ambisi kekuasaan yang begitu besar dengan cara-cara yang tidak terhormat demikian akan menghasilkan perilaku politik rendahan di tataran pemegang kekuasaan politik. Jika demikian yang terjadi maka demokrasi memberikan ruang terciptanya kapitalisme baru melalui praktek kompetisi yang tidak sehat.

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitas dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologi adalah pendekatan penelitian untuk memahami makna atau hakikat yang sebenarnya dari suatu gejala objek yang dikaji melalui jiwa atau kesadaran objek itu sendiri Nizar, dkk (2016:01).

Penggunaan jenis penelitian kualitatif oleh peneliti agar peneliti mendapatkan data yang detail tentang objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu tentang peran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam menanggulangi Radikalisme Agama di Kabupaten Sumenep, sekaligus hal ini mewajibkan bagi peneliti untuk turun langsung demi mendapatkan informasi dan data-data secara valid baik berbentuk tulisan maupun lisan, serta dapat dilakukan analisis secara mendetail sehingga peneliti dapat memahami situasinya secara objektif.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data secara langsung, sehingga dari data dapat digali secara mendalam menggunakan data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kabupaten Sumenep.

Sementara sumber data sekunder adalah merupakan sumber yang datanya tidak diberikan secara langsung kepada peneliti, masih memiliki prantara lain untuk mendapatkan data tersebut misalnya lewat wawancara kepada orang lain atau melalui dokumen sebagai data penunjang untuk mendukung penelitian (Sugiyono, 2017: 225).

Jenis sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah visi-misi kedua ormas tersebut, Rencana strategis program yang sedang berjalan khususnya dalam menanggulangi Radikalisme

agama, kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat umum, dokumen-dokumen, catatan yang berkaitan dengan pengelolaan ORMAS tersebut, literatur, artikel dan jurnal.

Sumber data yang diperoleh diatas tentu dihasilkan dari beberapa metode pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik penggunaan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam menggali data. Analisis data hasil dilakukan melalui berbagai tahapan dan proses mulai dari proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Nahdlatul Ulama

Pada Mukhtamar NU ketiga yang hadir dalam acara tersebut lebih banyak dari pada mukhtamar yang dilaksanakan sebelumnya. Mukhtamar ini dihadiri oleh 260 kyai dari 35 cabang di Jawa dan Madura, yang dilaksanakan pada tanggal 28-30 September 1928/23-25 Rabi'ul Tsani 1347 H. keputusan terpenting dalam mukhtamar yang ketiga ini adalah keputusan komisi lima (majlis khamis) yang dipimpin oleh K. Shaleh Bnayuangi dan beranggotakan K. Hasyim Asy'ari, K. Ridwan, K. Asnawi Kudus dan K. Muharram Kediri, dengan keputusan dibentuknya lajnatun Nasihin yang bertugas untuk menyebarkan propaganda pendirian NU keseluruh daerah.

Salah satu anggota tersebut adalah K. Hasyim Asy'ari dan beberapa tokoh lain focus untuk daerah Jawa Timur, gerakan untuk menyebarkan NU keseluruh daerah ini ternyata menemukan hasil yang cukup signifikan, dengan dibuktikan pada mukhtamar keempat yang dilaksanakan di Jawa Tengah, pada 17-20 September 1929 M/12-15 Rabi'ul Tsani 1348 telah dihadiri oleh 1450 peserta yang terdiri dari 350 kyai dan 900 orang pendamping serta 200 tanfiziyah.

Pada kurun ini, tingkatan kepengurusan NU sudah tercatat ada 63 cabang. 13 cabang di Jawa Barat, 27 cabang di Jawa Timur, 23 cabang di Jawa Timur termasuk Madura dan NU Sumenep sudah terbentuk (Aziz, 2016: 25). Pendirian NU Sumenep didirikan oleh salah satu tokoh yang berada di daerah Guluk-Guluk Kyai Ilyas Syarqawi yang merupakan salah satu santri K. Hasyim Asy'ari. Sebelum nyantri kepada K. Hasyim, K. Ilyas nyantri di Syaikhana Kholil Bangkalan bersama K. Hasyim dan beliau lebih senior dari K. Ilyas. kemudian atas permintaan Syaikhana Khalil, K. Ilyas nyantri kepada K. Hasyim di Tebi IrengJombang. K. Hasyim meminta kepada K. Ilyas untuk mendirikan NU di Sumenep. Lalu, K. Ilyas langsung bergerak untuk mendirikan NU di Sumenep, namun, beliau mengalami kesulitan karena secara geografis Guluk-

Guluk cukup jauh dari jangkauan pusat kota yakni 23 kilometer, dan disisi lain K. Ilyas sibuk mengurus pesantren yang diasuhnya yaitu Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Lubangsa. Hal ini yang menyebabkan K. Ilyas menemui kesulitan mendirikan NU di Sumenep selama 3 Bulan.

Kegigihan K. Ilyas dalam mendirikan NU ini menemukan keberhasilan, kemudian beliau mengumpulkan para tokoh kyai yang ada di kabupaten Sumenep untuk melakukan musyawarah pendirian NU. Pada musyawarah tersebut disepakati K. Abi Sujak menjadi Ketua Tanfiziyah dan K. Ilyas Syarqawi sebagai Rais Syuriah. Latar belakang para kyai menyepakati kyai Abi Sujak sebagai Ketua Tanfiziyah, menurut Kyai Tsabit (ketua PCNU Sumenep pada tahun 1984) K. Abi Sujak dan K. Ilyas sama-sama santri K. Hasyim Asy'ari, dan K. Abi Sujak masih muda, kyai energik serta memiliki kompetensi melakukan manajemen organisasi dan bertempat tinggal di daerah kota Sumenep. Setelah berhasil didirikan, kemudian K. Ilyas meminta kepada K. Hasyim Asy'ari untuk melantik kepengurusan PCNU Sumenep yang baru selesai dibentuk. Kemudian pada tahun 1929 K. Hasyim datang ke Annuqayah untuk melantik kepengurusan tersebut. Pelantikan ini dilaksanakan di rumah KH. Habib Biddin, Rubaru, sebagaimana yang disampaikan oleh K. Khazin. (Aziz, 2016:28).

Keberadaan ormas NU di gerakan oleh visi-misi keorganisasian di dalamnya, di antara visi misi Nahdlatul Ulama Sumenep adalah 'Menjadi Jam'iyah Diniyah Islamiyah Ijtima'iyah yang memperjuangkan tegaknya syi'ar Islam Ahlussunnah Waljamaah an-Nahdliyah demi terwujudnya kemaslahatan, kesejahteraan, keadilan dan kemandirian warga NU dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna mewujudkan visi besar diatas, NU Kabupaten berdasarkan hasil konferensi PCNU 2015 menetapkan misi-misigerakan sebagai berikut :

- a. melaksanakan dakwah Islamiyah Ahlussunnah wal Jamaah
- b. memberdayakan lembaga pendidikan dan pesantren untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berakhlak.
- c. meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan ekonomi ummat.
- d. menumbuhkan kebudayaan, seni dan sastra berbasis pesantren.
- e. mendorong kemandirian dalam kehidupan berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2) Muhammadiyah

Serupa dengan organisasi NU, Organisasi kemasyarakatan lainnya yang juga memiliki jumlah pengikut yang yang besar di Indonesia adalah Organisasi Muhammadiyah. Ormas ini memang memiliki catatan panjang dalam memperjuangkan Negara Indonesia, didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh seorang tokoh bernama K.H. Ahmad Dahlan. Sebagai organisasi yang berdiri cukup awal sebelum kemerdekaan, kemudian Muhammadiyah meperluas gerak secara sosial dan strukturnya. Berbagai daerah disambangi untuk didirikan tingkat kepengurusan. Kemudian sampailah ke Madura.

Keberadaan Muhammadiyah ditanah Madura terbilang cukup awal, bahkan juga sebelum proklamasi kemerdekaan. Tercatat masuk dan berdirinya Muhammadiyah di Madura sejak tahun 1925. Keberadaan ormas ini memang bisa dikatakan lebih dulu masuk ketimbang Nahdlatul Ulama bahkan sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama. Keberadaan Muhammadiyah di Madura ditelusuri lebih jauh karena memiliki hubungan emosional, yang mana pendiri Muhammadiyah K.H. Ahmad Dahlan juga pernah nyantri di Madura tepatnya pada K. Khalil Bangkalan (<https://jabartoday.com/>).

Organisasi Muhammadiyah mulai masuk dan diterima oleh warga sumenep pada akhir 1928 yang didirikan oleh Radiologi Sastro seorang sastrawan. Pada awal-awal masuknya Muhammadiyah ini berawal dari pengajian-pengajian dan kegiatan yang lain, kemudian pada tahun 1930 baru secara resmi berdiri di Sumenep yang selanjutnya aktivitas-aktivitas pengajian berlanjut serta kegiatan-kegiatan sosial digalakkan oleh Muhammadiyah seperti pengelolaan zakat. Penyebaran organisasi Muhammadiyah mulai disebarkan ke seluruh pelosok-pelosok terutama di daerah kepulauan yang ada di Sumenep seperti pulau Kangean dan sebagainya. Dengan penyebaran dan berdirinya berbagai cabang yang ada di Sumenep, kegiatan-kegiatan sosial semakin digalakkan. Aktivitas Muhammadiyah yang dijalankan adalah aktivitas sosial, pendidikan dan keagamaan (Bahrussurur, Wakil Ketua PD Muhammadiyah Sumenep, wawancara, 15 Mei 2020). Sebagai sebuah organisasi keagamaan, keberadaan visi dan misi organisasi adalah sebuah keniscayaan dan keharusan dalam menggerakkan roda organisasi. Visi organisasi Muhammadiyah adalah menjadikan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang utama serta terciptanya kondisi dan factor-factor pendukung bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sementara misi organisasi Muhammadiyah adalah sebagai berikut :

- a. Terciptanya perkembangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berkualitas utama (Unggul) dibandingkan gerakan- gerakan keagamaan lain dalam melaksanakan misi dakwah dan tajdid yang ditujukan oleh keunggulan pelaku gerakan, system gerakan, organisasi dan kepemimpinan jaringan, infrastruktur, amal usaha dan aksi gerakan sebagai factor penting dan strategis bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar- benarnya serta peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan umat, bangsa dan percaturan global.
- b. Terlaksananya ajaran Islam dan tumbuhnya kesadaran masyarakat yang lebih luas akan keutamaan kehidupan Islami, yang menjamin terciptanya tata kehidupan (system sosial) yang baik/unggul (utama) disegala bidang kehidupan sebagai wujud kehadiran Islam yang bersifat rahmatan lil alamin dan membawa keutamaan hidup umat manusia serta meraih keselamatan/kebahagiaan kehidupan duniawi dan akhirat (*Hasanah fi dunya wal akhirah*).

- c. Tumbuhnya kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin berkualitas (utama) yang tercermin dengan meningkatnya kehidupan-kehidupan keagamaan, moralitas, intelektualitas dan kapasitas sosial masyarakat, serta mendorong berkembangnya fungsi-fungsi kekuatan sosial dan kelembagaan- kelembagaan pemerintah yang menjamin terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, adil, makmur, bermartabat dan berdaulat dibawah naungan ridha Allah SWT (*Baldataun thayyibatun wa rabbun ghafur*).
- d. Berkembangnya tatanan kehidupanglobal yang adil, damai dan bermartabat serta semakin proporsional peran dan tanggungjawab ummat Islam (dunia Islam) diantara komunitas dunia yang lain sebagai perwujudan kehadiran Islam sebagai rahmatan lil alamin dalam dinamika peradaban dunia.
sumber: <http://sumenep.muhammadiyah.or.id.html>

B. Kiprah NU dan Muhammadiyah dalam Upaya Deradikalisasi Agama di Kabupaten Sumenep

1) Kiprah NU

Sebagai organisasi ke Islaman yang ikut andil dalam pendirian Negara Indonesia dan berdiri sejak sebelum kemerdekaan, dalam perjalanannya NU senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan serta berkomitmen mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen ini sebagai representasi organisasi yang berskala nasional dalam bentuk tanggungjawab kenegaraan. Kemudian hal tersebut terumus dalam landasan ideal khusus yang disebut oleh NU sebagai Dasar Perjuangan sebagaimana termaktub dalam pasal 3 Peraturan Dasar (Latif, 2016: 61).

Pada aspek keagamaan, secara umum NU berdasar pada Islam Ahlul sunnah wal Jamaah sebagai landasan berpijak serta senantiasa mensyi'arkan ajaran tersebut demi kokohnya keislaman yang berada di bumi Indonesia. Upaya penyebaran keislaman yang dilaksanakan oleh NU dengan cara tidak ekstrim serta bijaksana. Bentuk ketidak ekstriman ini terermin dari kegiatan keagamaan yang diajarkan dimasyarakat tidak gegabah untuk memberikan penghukuman terhadap problematika yang ada baik menghukumi kafir atau bid'ah. Dalam prinsipnya NU memiliki perhatian tinggi dalam menjaga tradisi yang diajarkan oleh leluhur sejak zaman walisongo. Tradisi dan budaya yang berlangsung di tengah masyarakat tetap terjaga secara konsisten dengan spirit keberagaman Islam secara substansialis

Sehingga dengan keberadaan pemahaman yang inklusif terhadap ajaran agama serta menjaga tradisi yang ada, banyak kaum abangan beralih menjadi santri atau menjadi NU, karena merasa punya kesamaan serta merasa mendapat justifikasi hukum dalam ritual keagamaan yang dilaksanakan selama ini, proses peralihan kaum abangan menjadi NU disebut sebagai santrinisasi, proses perpindahan ini disebabkan oleh konsistensi NU memperaktekkan budaya lokal secara sistematis, sehingga dapat menyambungkan emosi anantara abangan dan NU (Syam, 2011:123) Dengan spirit gerakan yang demikian, NU sendiri terus massif melakukan gerakan untuk melwan gerakan keislaman yang dapat merusak tatanan kehidupan yang sudah mapan dibangun oleh para leluhur. Sebagaimana yang terjadi belakangan yang disebut dengan radikalisme agama. Sebagai organisasi tingkatan cabang, Nahdlatul Ulama Sumenep memiliki komitmen sebagaimana yang terumus dalam peraturan yang berada diatasnya, serta corak keberagaman sesuai dengan ajaran yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama secara umum.

Sejak berdiri pertama, NU Sumenep memiliki peranan penting dalam membangun masyarakat Islam yang dinamis melalui pesantren dan pendidikan kepada masyarakat.

Pada setiap lini kehidupan selalu ada di tengah-tengah masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang kompleks, mulai dari gerakan sosial, keagamaan, politik, ekonomi dan sebagainya. Dalam mendidik masyarakat NU berupaya untuk melembagakan sistem-sistem sosial yang berlaku menjadi berbagai kegiatan yang langsung bersentuhan. Terdapat beberapa kegiatan yang digerakkan oleh tokoh-tokoh NU Sumenep sejak dahulu untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat dengan strategi sebagai berikut :

a. Menggunakan Jaringan Pesantren

Masyarakat Sumenep merupakan masyarakat yang memiliki pegangan teguh kepada para kiai dengan menaruh besar harapan pendidikan anak-anaknya sebagai penerus kepada pesantren-pesantren. Hingga seakan tidak sah apabila masyarakat sumenep tidak nyantri baik menetap di pondok pesantren atau nyantri di suaru-suaru bersama kiai kampung. Persebaran NU di Sumenep memang tidak bisa dilepaskan dari pesantren, sebab para pendiri sejak pertama melakukan konsolidasi kepada para pemimpin pesantren dan tokoh kiai untuk mendirikan NU, kemudian setelahnya melakukan pendidikan kepada masyarakat sesuai dengan kultur yang ada di Masyarakat. Kaderisasi pesantren kemudian terus digalakkan, dengan banyaknya anak-anak yang mondok di pesantren kemudian diwarisi nilai-nilai ke NU oleh kiai yang mengajarnya. Hal ini dilakukan secara massif dan sistematis. Sehingga hal tersebut menjadikan santri kelak ketika pulang ke daerah masing-masing menyebarkan nilai-nilai ke NU di masyarakat dan menjadikan masyarakat juga secara lambat-laun ikut terhadap ajaran-ajaran NU. Gerakan ini telah memberikan bukti nyata yang sampai saat ini Nahdlatul Ulama masih berdiri kokoh di Sumenep secara umum.

b. Media Kompolan

K. Abi Sujak yang merupakan salah satu pendiri NU Sumenep merupakan salah satu tokoh kyai penggerak kompolan, ia adalah ketua kompolan sarwah yang di dalamnya mengajarkan tasawwuf serta aktivitas berdzikir yang cukup panjang. Selain K. Abi Sujak banyak tokoh-tokoh kiai lain yang aktivitas memberikan pendidikan kepada masyarakat menggerakkan kompolan-kompolan diberbagai daerah. Tradisi ini dapat menguat di masyarakat hingga sekarang disebabkan oleh solidaritas sosial yang ada di masyarakat khususnya masyarakat Sumenep sangat kuat, relasi sosial, kekerabatan, gotong royong menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, yang kemudian diterjemahkan dalam falsafah Taneyan Lanjhang. Terdapat beragam aktivitas yang dilaksanakan dalam kegiatan kompolan, baik tahlilan, sarwah, yasinan, ngaji kitab atau ceramah yang dipimpin oleh seorang tokoh di suatu lingkungan tertentu. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan secara rutin sesuai dengan kesepakatan jamaah dan kiai. Dengan media ini kemudian para tokoh NU dapat menjangkau masyarakat secara langsung, sehingga mampu melakukan transformasi sosial dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemahaman keagamaan Islam moderat.

c. Doktrinasi

Para kiai pesantren memiliki peranan sentral ditengah masyarakat secara umum. Termasuk yang paling kuat kepada santri yang diasuhnya. Para kiai biasanya melakukan penanaman keyakinan nilai kepada santrinya untuk dijadikan sebagai landasan kehidupannya, termasuk disini dalam mewarisi nilai-nilai ke NU kepada masyarakat dan santrinya, sehingga dengan posisi sentral ditengah masyarakat dawah kiai menjadi dasar terhadap keyakinan dan tindakannya.

Termasuk doktrinasi dilakukan kepada anak-anaknya untuk kelak dapat melanjutkan perjuangan yang ditempuh selama ini, serta dapat menggantikan perannya

untuk dapat mendidik masyarakat serta menjaga masyarakat guna mencapai kehidupan yang mapan sertaberkemajuan.

d. Pendekatan Langsung

Tokoh-tokoh NU sejak dahulu terbiasa dengan aktivitas yang selalu bersama masyarakat tradisi kompolan menjadi salah satu bentuk media untuk bersama masyarakat. Selain kompolan biasanya kiai senantiasa bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik silaturrahim atau kegiatan yang lainnya. Sehingga kiai dan masyarakat memiliki kedekatan secara emosional, dan kemudian dengan interaksi yang tidak kaku masyarakat menempatkantumpuan untuk membicarakan banyak hal kepada para kiai dan tokoh-tokoh NU yang lain (Aziz, 2016:37).

Hal ini memberikan gambaran secara kuat tentang peran tokoh- tokoh NU dalam memberikan pendidikan serta pemahaman kepada masyarakat banyak, sehingga dari strategi tersebut kemudian masyarakat memiliki militansi yang cukup kuat kepada NU dengan konsekuensi tetap berpegang teguh memegang teguh nilai-nilai ke NU an sampai saat ini. Serta menjadi bukti gerakan-gerakan kultural dan struktural NU khususnya di kabupaten Sumenep berhasil melakukan transformasi kehidupan kepada masyarakat secara umum

Beberapa strategi yang dilakukan oleh kiai tersebut, dengan bukti nyata berhasil membangun masyarakat dari pinggiran, serta mampu membentengi masyarakat sejak dahulu dari berbagai pemahaman- pemahaman khususnya pemahaman keagamaan yang masuk dari luar. Termasuk saat ini yang terus berkembang adalah gerakan kekerasan atas nama agama dengan mengklaim tradisi masyarakat yang sejak dahulu bertahan sebagai sesuatu kesalahan hingga menganggap masyarakat Indonesia halal darahnya hingga dibom karena klaim kebenarannya sendiri (*Truthclaim*). Upaya untuk menghalau gerakan-gerakan radikalisme agama khususnya di kabupaten Sumenep menjadi salah satu prioritas untuk membentengi masyarakat dari rong-rongan gerakan radikal oleh NU Cabang Sumenep. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen NU terhadap Negara. Secara prinsip yang kemudian termaktub dalam peraturan-peraturan yang berlaku secara kelembagaan. dalam prinsip kebangsaan, dalam keagamaan NU berpegang teguh pada nilai-nilai moderat, plural serta toleran. Dan terhadap kekerasan atas nama agama yang dapat merongrong tatanan yang sudah ada. Pada hal ini NU menolak terhadap gerakan tersebut. dalam pemikiran keagamaan NU memegang teguh nilai-nilai moderat atau tawassuth. Sebagaimana yang disampaikan oleh sekretaris Syuriah K. Imam Hendriyadi bahwa Islam Ahlussunnah wal jamaah menganggap Negara sudah final, serta pemikiran keagamaan sudah final. Pegangan yang dipakai dalam NU adalah moderat (tawassuth), toleran (tasamuh), seimbang (tawazun), dan netral (I'tidal), sehingga dengan hal tersebut ketika mendapati suatu perilaku yang menyimpang dari kehidupan publik, akan diingatkan menggunakan metode dakwah yang digunakan oleh NU (K. Imam Hendriyadi, sekretaris Syuriah PCNU Sumenep, wawancara 13 Mei 2020).

Bagi NU, perilaku-prilaku yang berupaya untuk merusak tatanan yang sudah ada, seperti penghukuman negatif terhadap tata Negara yang sudah berdiri dan sudah disepakati sejak pendirian Negara merupakan perilaku yang tidak baik. yang menyepakati Negara Indonesia diantaranya adalah tokoh-tokoh ulama. Dalam tubuh NU, Syariat Islam tidak perlu menjadi dasar Negara secara positif, cukup dilakukan secara kultural serta diajarkan kepada masyarakat sehingga dapat membentuk perilaku publik yang sesuai dengan prinsip Islam tanpa harus melakukan kekerasan. Ketika agama menjadi hukum positif, maka kekuatan kultural keagamaan yang memberikan spirit dari setiap perilaku tidak ada karena orang tidak melakukan karena takut pada PERDA (Peraturan Daerah). Artinya, tanpa dijadikan sebagai hukum positif syari'at islam sudah berlaku di

masyarakat oleh pendidikan para ulama' dan kiai. Dan disini NU akan merespon dengan memberikan edukasi terhadap orang-orang yang menginginkan berdirinya Negara berdasar agama, respon NU terhadap hal tersebut sudah sejak dahulu, sebab dasar Negara sudah final dan tidak perlu diperdebatkan lagi (K. Dardiri Zubairi, Wakil Ketua PCNU Sumenep, wawancara, 2 Mei 2020).

Prinsip moderat NU mengindikasikan tidak berpihak terhadap liberal kiri atau radikal kanan. Maka ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok radikal NU kontra dengan pemahaman tersebut. salah satunya dalam tatanan kenegaraan. NU sejak dahulu kala ikut mendirikan Negara Indonesia termasuk korban jiwa dan raga dalam peperangan menghadapi penjajah, termasuk yang melawan pemberontakan komunis adalah orang-orang NU, sebagai bukti komitmen terhadap Negara Indonesia dan toleran dalam keberagaman (Zainol Hasan, Wakil Ketua PCNU Sumenep, Wawancara, 3 Mei 2020).

2) Peran Organisasi Muhammadiyah

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum sejak 1914, Muhammadiyah memiliki peraturan yang dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan organisasi dari semua tingkatan serta pedoman hidup dalam menjalani kehidupan. Kelahirannya tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan mereka dalam mempertahankan Negara, Semangat bergelora dalam membangun organisasi demi keutuhan kehidupan masyarakat memang sudah sejak lama terbangun dan itu merupakan bagian dari bentuk komitmen yang menjadi tujuan segenap aktivitasnya. Dasar perjuangan mereka terumus dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah sebagai dasar dari segenap aktivitas dan kegiatannya. Fungsi Anggaran Dasar Muhammadiyah diantaranya adalah sebagai :

- a. Pedoman hidup warga Muhammadiyah
- b. Pedoman dalam menjalankan perserikatan Muhammadiyah
- c. Ideologi dasar bagi seluruh anggota Muhammadiyah
- d. Tujuan dasar Muhammadiyah yang harus dicapai dengan berbagai bentuk amal usaha
- e. Menjelaskan cita-cita dan tujuan Muhammadiyah (Supriyadi, 2019:35). Manifesto gerakan Muhammadiyah yang berdasar pada nilai-nilai fundamental dalam diri Muhammadiyah sendiri melahirkan berbagai gerakan-gerakan dalam membangun tatanan kehidupan yang lebih maju, mendorong pihak berwajib untuk bekerja maksimal demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran, bekerjasama dan berpangku tangan bersama golongan lain dalam menyiarkan ajaran Islam, serta memberikan koreksi ketika melihat sesuatu yang menyimpang dengan metode dakwah yang dimiliki dengan prinsip keramahan.

Kepribadian yang menyifati dirinya dengan hal tersebut, berbagai perilaku kekerasan yang mengatasnamakan agama, Muhammadiyah sendiri menolak terhadap hal tersebut, sebab hal tersebut bukan merupakan ajaran Islam *rahmatan lil alamin* dan dapat merusak tatanan kehidupan termasuk Islam itu sendiri. Secara prinsipil konsepsi Muhammadiyah tidak menginginkan kekerasan dalam menjalankan dakwah, komitmen terhadap moderasi, tidak ekstrim karena merusak terhadap berbagai tatanan dan Muhammadiyah menentang dan menolak secara keras terhadap perilaku kekerasan atas nama agama (Ahmad Hudaifah, Wakil Ketua PD Muhammadiyah Sumenep, wawancara, 11 Mei 2020). Sikap seragam terkait tindakan radikalisme dan terorisme jugadisampaikan oleh sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mukti memberikan penjelasan lebih implementatif bahwa dalam upaya mereduksi

fenomena radikalisme agama di Indonesia, maka kebijakan moderasi yang digagas Muhammadiyah dengan program deradikalisasi yang menjadi acuan negara dalam penanganan terorisme pada dasarnya memiliki orientasi yang sama, tetapi secara psikologis berbeda.

Moderasi atau moderasi beragama punya langkah prefentif sekaligus kuratif. Bahkan, pemakaian pertama istilah deradikalisasi adalah Amerika Serikat, dan justru saat ini Amerika Serikat sudah meninggalkan istilah itu. Peneliti Pusat Kajian Radikalisme dan Terorisme, Adhe Bhakti juga mengonfirmasi perubahan tersebut. Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya sudah banyak mengevaluasi penggunaan istilah-istilah di isu terorisme.

Violent extremism menjadi istilah yang banyak digunakan. Hal ini karena ada banyak istilah yang tidak sesuai dengan konsepnya. Ketika konsep keliru maka akan berdampak pada implementasinya. Deradikalisasi bertujuan untuk melawan radikalisasi. Radikalisasi tidak semua muncul menjadi terorisme. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nasir. Menurutnya Muhammadiyah secara tegas menolak radikalisme atau ekstrimisme apapun bentuknya, termasuk terorisme dan tindakan teror. Para pelaku terror yang mengatasnamakan Islam, tentu tidak bisa disangkal adanya. Akan tetapi pemaknaan mereka pada doktrin-doktrin agama justru tidak mencerminkan substansinya. Pada sisi lain, deradikalisasi yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) justru ingin melawannya dengan hal yang tidak cukup substantive, bahkan cenderung sekedar menjalankan proyek semata. Moderasi menjadi pilihan karena pikiran seseorang menjadi radikal tidak semata-mata karena doktrin agama yang radikal dan revolusioner. Ada persoalan-persoalan dasar yang luput dilihat, yakni ketidakadilan (*injustice*) dalam banyak bidang.

Ketidakadilan memang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang belum selesai. Misalnya persoalan mayoritas dan minoritas tidak melulu tertuju pada perbandingan jumlah suku dan agama. Alasan kalangan radikalisme dan terorisme adalah kerinduan untuk hidup sejahtera, adil dan makmur. Alasan ini terkesan absurd tetapi faktanya, mereka menyalahkan sistem dan praktik-praktik liberalism yang menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi serta politik. Pada satu kasus, minoritas orang kaya mendominasi mayoritas orang miskin. Data dari *Credit Suisse Global Wealth Report* memperlihatkan, 1 persen orang kaya Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan Negara. Jika dinaikkan, 10 persen orang kaya menguasai 75,7 persen kekayaan Negara (<http://www.independent.co.uk>) Oleh karena itu dalam upaya melakukan upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme, Muhammadiyah melakukan upaya pencegahan paham radikalisme tersebut melalui dua sector yaitu internal dan eksternal. Pada sektor internal ada dua ranah. *Pertama* adalah ranah struktural. Muhammadiyah menginstuksikan pimpinan Muhammadiyah sampai ke ranting-ranting untuk meneguhkan ideologi Islam berkemajuan dan mewujudkan *Darul Ahdi wa Syahdah*. Ortom-ortom (organisasi otonom)

Muhammadiyah juga turut memperkuat basis kaderisasi dengan pembinaan yang humanis. Selain itu juga memaksimalkan kinerja lembaga-lembaga dan majelis- majelis dalam struktural khususnya dalam pemberdayaan umat melalui sektor Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Salah satu contoh kegiatan ini adalah Madrasah Perempuan Berkemajuan (MPB) yang diinisiasi oleh PP Aisyiyah. Dalam kegiatan ini doktrin- doktrin kunci dibahas dalam madrasah ini, seperti pemaknaan jihad dalam perspektif perempuan, khilafah dalam pandangan Muhammadiyah, dan penegasan Darul Ahdi Wasyahadah.

Kedua, ranah kultural. Muhammadiyah memasukan Islam berkemajuan dan mengaktualisasikan Darul Ahdi wa Syahdah dalam penyampaian materi-materi pelajaran di sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, panti-panti asuhan, majelis-majelis pengajian, dan kampus-kampus milik Muhammadiyah. Selain peneguhan di internal, Muhammadiyah juga turut terlibat diri dalam ranah dialog-dialog keumatan dan kemanusiaan lintas agamadan peradaban baik dalam skala nasional ataupun internasional.

Ketiga, ranah politik. Muhammadiyah sering mengkritisi kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintah termasuk program deradikalisasi agar dalam pelaksanaan program tersebut berorientasi pada substansi, bukan project oriented. Muhammadiyah juga mendorong advokasi terhadap korban- korban penindakan kekerasan aparat pemerintahan atas nama pemberantasan terorisme terhadap masyarakat (Saefuddin Zuhri, 2017:97)

BAB V SIMPULAN

Moderasi menjadi pilihan sikap dan komitmen kelembagaan baik NU dan Muhammadiyah dalam merespon pola penanganan dan penanggulangan radikalisme dan terorisme yang terjadi di Indonesia. Deradikalisasi dipandang oleh mereka sebagai upaya mengurangi atau menghilangkan paham radikalisme dan terorisme seseorang dengan cara yang ekstrem. Dengan kata lain, ekstrem dilawan dengan ekstrem. Oleh sebab itu, moderasi adalah cara lain yang dianggap lebih baik. Baik NU dan Muhammadiyah secara kelembagaan secara tegas menolak adanya radikalisme dan terorisme hadir di Indonesia. Akan tetapi cara-cara yang harus dilakukan harus memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang hakiki. Perlu dicari dan dipertimbangkan akar-akar penyebab seseorang menjadi radikal.

Baik NU dan Muhammadiyah melihat penyebab utama radikalisme dan terorisme di Indonesia adalah ketidakadilan baik di bidang ekonomi, sosial ataupun politik. Bagi Muhammadiyah ada tiga cara yang dilakukan mereka yakni internal struktural, yakni upaya-upaya penguatan internal pada Darul Ahdi Wasyahadah. Kemudian upaya kultural yakni penguatan-penguatan ideologi Islam rahmatan lil 'alamin ke akar rumput dan masyarakat umum. Dan terakhir adalah dengan proses-proses advokasi ke ranah politik untuk mengkritisi pemerintah untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan ekonomi, pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang adil dan pemberdayaan masyarakat yang optimal.

Sementara NU sendiri melakukan langkah-langkah afirmasi nilai-nilai Aswaja An-nahdliyah melakukan kegiatan kaderisasi yang intensif agar mampu mewujudkan budaya dan peradaban yang beradab, toleran, harmoni dan cinta damai. Sementara pada sector pendidikan upaya pembaharuan kurikulum yang seimbang dan lebih substantive.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Aziz, Taufiqil. 2016. *Dinamika NU Sumenep Dalam Lintasan Masa*. Ambunten: Zeva Press.
- Bagir, Haidar. 2006. *Buku Saku Filsafat Islam*. Bandung: PT Mizan Pustaka
- Hasan, Tolchah, Muhammad. 2016. *Pendidikan Multikultural Sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme*. Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Islam Malang.
- Latif, Hasyim, M. 2019. *Nahdlatul Ulama Penegak Panji Ahlussunnah Wal Jamaah*. Surabaya: PW LTN NU Jatim bekerjasama dengan Muara Progresif. Mukhlisi, dkk. 2012. *Mozaik Studi Islam; Dinamika Penjelajahan Konsep Multi Paradigma*. Yogyakarta: Nadi Pustaka bekerjasama dengan Maseghit Press.
- Mukhlisi dkk, 2018. *Generasi Negeri Berdikari*. Gapura : CV. Abida Mahran.
- Naim, Ngainun. 2014, *Islam dan Pluralisme Agama*, Yogyakarta: Lingkar Media.
- Nizar, dkk. 2016. *Pendekatan Fenomenologi Dalam Studi Islam*. Makalah. Tidak dipublikasikan. Jurusan Syariah Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Syam, Nur, 2011. *Madzhab-Madzhab Antropologi*. Yogyakarta: LKiS Group
- Supriyadi, 2019, *Pendidikan Kemuhammadiyah*, Surabaya: Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.
- Zuhri, Saefudin. (2017). *Deradikalisasi Terorisme, Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdlatul Ulama*, Jakarta : Daulat Press.